

PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2005-2023

Nurul Amalia Fitri¹⁾, Imam Malik²⁾

^{1,2}Prodi Akuntansi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Email: nuruldekneung@gmail.com¹ imam.malik03@gmail.com²

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of capital expenditure, balancing funds and local revenue on financial performance. The research location is the Bireuen Regency Government for the 2005-2023 Fiscal Year. The method used is a quantitative method with a multiple linear regression model, to analyze the effect of independent variables on dependent variables using SPSS 25. Based on the results of the study, it is known that capital expenditure has a positive and significant effect on the financial performance of the Bireuen Regency Government for the 2005-2023 Fiscal Year with a value of t hitung $8.463 > t$ tabel 1.75305 and a significance value of t from X_1 of $0.000 < 0.05$. Balancing funds have a negative effect on the financial performance of the Bireuen Regency Government for the 2005-2023 Fiscal Year with a value of t hitung $-0.679 < t$ tabel 1.75305 and the significance value of t from X_2 is $0.000 < 0.05$. Local Original Income does not affect the Financial Performance of the Bireuen Regency Government in the 2005-2023 Fiscal Year with a value of t hitung $-1.378 < t$ tabel 1.75305 and the significance value of t from X_3 is $0.188 > 0.05$. Capital Expenditure, Balancing Funds and Local Original Income simultaneously affect the Financial Performance of the Bireuen Regency Government in the 2005-2023 Fiscal Year with F count value $36.592 \geq F$ table 3.29 with a significance value of $0.00 \leq 0.05$. The estimated R^2 value of 0.856 means that 85.6% of the Capital Expenditure, Balanced Fund and Local Original Income variables have an effect on the Financial Performance variable of the Bireuen Regency Government for the 2005-2023 Fiscal Year.

Keywords : The Influence of Capital Expenditure, Regional Original Income Balance Fund, Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal, dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Tempat penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan model regresi linear berganda, untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023 dengan nilai *thitung* $8.463 > ttabel$ 1.75305 dan nilai signifikansi t dari X_1 sebesar $0,000 < 0,05$. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023 dengan nilai *thitung* $-0.679 < ttabel$ 1.75305 dan nilai signifikansi t dari X_2 sebesar $0,000 < 0,05$. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023 dengan Nilai *thitung* $-1.378 < ttabel$ 1.75305 dan nilai signifikansi t dari X_3 sebesar $0.188 > 0,05$. Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023 dengan nilai *Fhitung* $36.592 \geq Ftabel$ 3.29 dengan nilai signifikannya $0,00 \leq 0,05$. Nilai estimasi R^2 sebesar 0.856 artinya sebesar $85,6\%$ variabel variabel Belanja Modal, dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023.

Kata Kunci: Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Konsekuensi dari adanya otonomi daerah yaitu harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi kekuasaan dapat dicapai. Kenyataan yang terjadi adalah masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 22 menyebutkan bahwa struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selanjutnya dalam pasal 23 dijelaskan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; sedangkan yang dimaksud belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah; dan pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, idealnya pelaksanaan belanja daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan *outcome* yang diharapkan dari kegiatan dan program, sehingga pendekatan kinerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan

inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan *revenue* oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang sering disebut dengan Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan public.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan *expenditure* yang terdiri belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian akan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi baik pula. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten bireuen tahun anggaran 2005-2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Halim (2007: 101) “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Mardiasmo (2009: 67) “Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharanya”

Fungsi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dimana dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Darise, 2008:137). Dalam Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Menurut Djaenuri (2012) “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab

(akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2008 :25).

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketegantungan dana dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2002). Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari empat, yaitu: Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

Kinerja Keuangan Daerah

Undang-undang No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya diharapkan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Halim, 2012). Kinerja Keuangan merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat

pertanggungjawaban. Menurut Fahmi (2012:2) yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengertian Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006:239) merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu pendekatan guna membuktikan teori-teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel-variabel yang dapat diukur dengan aplikasi yang menghasilkan data angka sehingga dapat dianalisa menggunakan statistik deskriptif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, dimana dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan juga menginterpretasikan pengaruh antara variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023.

Lokasi Penelitian

lokasi penelitian adalah menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen. Waktu yang signifikan pada penelitian ini yaitu dilaksanakan sejak Desember 2023-Mei 2024

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023. Sampel dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023.

Teknik Analisa data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu Metode dokumentasi (*documentary study*) adalah pengumpulan berbagai data dan informasi yang dipublikasikan oleh suatu lembaga, dinas dan instansi terkait dalam situs website resmi yang dapat dilihat oleh masyarakat. Kemudian diolah dan dipublikasikan kepada masyarakat luas dengan melihat catatan tertulis atau dokumen dari situs website instansi tersebut sesudah itu mengolah data setelah data berhasil dikumpulkan, data harus diproses dan diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Untuk mengekstrak data menjadi informasi, perlu metode tertentu yang sesuai dengan karakteristik data sehingga hasil analisisnya akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS 25. Selanjutnya deskripsi dari masing-masing variabel dijelaskan berikut ini:

Tabel
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_X1	19	17.60	19.75	18.9272	.58890
LN_X2	19	19.38	21.19	20.4895	.51181
LN_X3	19	15.51	19.26	18.0484	1.22167
LN_Y	19	1.95	3.35	2.7476	.34471
Valid N (listwise)	19				

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Hasil deskriptif terhadap Belanja Modal dengan 19 sampel memiliki rata-rata sebesar Rp18,92. Belanja Modal tertinggi sebesar Rp19,75 dan paling rendah sebesar Rp17,60 dengan standar deviasi yaitu sebesar Rp0.588. Hasil deskriptif terhadap Dana Perimbangan memiliki rata-rata sebesar Rp20,48. Dana Perimbangan tertinggi Rp21,19 dan yang paling rendah sebesar Rp19,38 dengan standar deviasi yaitu sebesar Rp0.511. Hasil deskriptif terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki rata-rata sebesar Rp18,04. Pendapatan Asli Daerah tertinggi Rp19,26 dan yang paling rendah sebesar Rp15,51 dengan standar deviasi yaitu sebesar Rp1,221. Hasil deskriptif terhadap Kinerja Keuangan memiliki rata-rata sebesar Rp2,74. Kinerja Keuangan tertinggi sebesar Rp3,35 dan yang paling rendah sebesar Rp1,95 dengan standar deviasi yaitu sebesar Rp0,44.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Tabel
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		19
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11951904
Most Extreme Differences	Absolute	.156
	Positive	.133
	Negative	-.156
Test Statistic		.156
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Berdasarkan tabel 4.2 yang telah disajikan di atas, besarnya nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,200. Apabila nilai signifikansi di atas 0,05 maka variabel-variabel secara statistic telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian, dapat diartikan bahwa nilai signifikansi sebsar $0,200 > 0,05$. Data variabel independen yaitu Belanja Modal (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (X3) memenuhi uji normalitas, dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Model yang baik adalah tidak terjadi multikolonieritas. Berikut adalah hasil ouput koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini

Tabel
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN_X1	.261	3.830
	LN_X2	.161	6.218
	LN_X3	.113	8.870

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai tolerance variabel Belanja Modal (X1) $0,261 \geq 0,10$ dan nilai VIF $3.830 \leq 10$ Dan Nilai tolerance variabel Dana Perimbangan (X2) nilai tolerance $0,161 \geq 0,10$ dan nilai VIF $6.218 \leq 10$ Dan Nilai tolerance variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) nilai tolerance $0,113 \geq 0,10$ dan nilai VIF $8.870 \leq 10$. Seluruh nilai tolerance tidak kurang dari 0,10 atau $\geq 0,10$ dan nilai VIF seluruh variabel tidak lebih dari 10 atau ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak ada multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Dengan kriteria:

Tabel
Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.854	.901		-2.058	.057		
	LN_X1	.018	.039	.202	.464	.649	.261	3.830
	LN_X2	.122	.057	1.186	2.135	.052	.161	6.218
	LN_X3	-.049	.029	-1.131	-1.705	.109	.113	8.870

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: data diolah (2024)

Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi X1 sebesar $0,649 > 0,05$, nilai signifikansi X2 sebesar $0,052 > 0,05$, dan nilai signifikan (X3) sebesar $0,109 > 0,05$ Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan jika Durbin Watson dengan ketentuan jika Durbin Watson:

Uji Autokorelasi

Durbin Watson	1,153
---------------	-------

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai DW adalah 1,153 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 dan +2 berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi positif pada model dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi linear berganda. Hasil pengolahan data menggunakan pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

**Tabel
 Hasil Regresi Linear Berganda**

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.687	2.374		2.396	.030		
	LN_X1	.868	.103	1.483	8.463	.000	.261	3.830
	LN_X2	-.854	.150	-1.268	-5.679	.000	.161	6.218
	LN_X3	-.104	.075	-.367	-1.378	.188	.113	8.870

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data diolah (2024)

Dari tabel di atas hasil uji analisis regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : Berdasarkan persamaan regresi, diperoleh nilai konstanta sebesar 5.687. Berdasarkan hasil dari persamaan regresi diatas variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar 0.868 yaitu bernilai positif. Berdasarkan hasil dari persamaan regresi diatas variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar -0.856 yaitu bernilai negative. Berdasarkan hasil dari persamaan regresi diatas variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien regresi sebesar -0.104 yaitu negatif. Maka, asumsi bahwa variabel lain konstan, apabila variabel Pendapatan Asli Daerah turun satu satuan, sehingga Kinerja Keuangan akan menurun sebesar -0.104%.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

**Tabel
 Hasil Uji t**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.687	2.374		2.396	.030
	LN_X1	.868	.103	1.483	8.463	.000
	LN_X2	-.854	.150	-1.268	-5.679	.000
	LN_X3	-.104	.075	-.367	-1.378	.188

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel dengan nilai signifikannya sebesar 0,05 dapat diketahui bahwa:

Nilai t_{hitung} 8.463 > t_{tabel} 1.75305 dan nilai signifikansi t dari X1 sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Nilai t_{hitung} -0.679 < t_{tabel} 1.75305 dan nilai signifikansi t dari X2 sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima yaitu adanya pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan. Nilai t_{hitung} -1.378 < t_{tabel} 1.75305 dan nilai signifikansi t dari X3 sebesar 0.188 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H3) ditolak yaitu tidak adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

**Tabel
Hasil Uji F**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.882	3	.627	36.592	.000 ^b
	Residual	.257	15	.017		
	Total	2.139	18			
a. Dependent Variable: LN_Y						
b. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2						

Sumber: data diolah (2024)

Dari hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} 36.592 \geq F_{tabel} 3.29 dengan nilai signifikannya 0,00 \leq 0,05 artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Belanja Modal (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3) secara simultan terhadap Kinerja Keuangan (Y).

Koefisien determinasi (R^2)

**Tabel
Hasil Koefisien Determinasi**

Adjusted R-Squared	0.856
--------------------	-------

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui nilai estimasi R^2 sebesar 0.856 artinya sebesar 85,6% variabel variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023. Sementara sisanya sebesar 14,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

KESIMPULAN

Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023. Hal tersebut menandakan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama mampu berkontribusi secara nyata dalam menaikkan tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2005-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise. N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi sektor Publik. Jakarta: Indeks
- Djaenuri. Aries. (2012). Hubungan Keuangan Pusat- Daerah. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Fahmi. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Halim. Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba empat
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset